

# PERUBAHAN RENJA 2019

## BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN  
DAERAH (BPPD)**

Jalan Pramuka Km 13 Karangtengah Cianjur

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun

Perubahan Rencana Kerja 2019 sebagai dokumen Perencanaan PD (Perangkat Daerah) mengacu pada Renstra PD serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dengan tujuan menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan tahun 2019 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, mudah-mudahan dapat berguna bagi peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur. Amiin.

Cianjur, Juli 2019

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah,  
Kabupaten Cianjur,

Drs. CAHYO SUPRIYO  
NIP. 19620629 198903 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Sampai Dengan Triwulan II...	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD .....	12
2.3 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD 2019.....	16
<b>BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	18
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019.....	18
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2019..	24
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	28

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur periode tahun 2016-2021, dimana sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Cianjur yang tercantum dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 yaitu Cianjur Lebih Maju dan Agamis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi. Renja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perubahan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2019 merupakan rencana tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 yang memuat rencana pencapaian indikator-indikator kinerja yang tersusun dalam Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan daerah tahun 2016-2021, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 08).

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur berdasarkan Kewenangan melaksanakan penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan, dimana dokumen dimaksud memuat substansi rencana program dan kegiatan yang disertai dengan target kinerja perangkat daerah tahun 2019 dan rencana pendanaan dan sumber pendanaan.

lembaga ini dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis badan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan;
- b. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

disamping itu lembaga ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perpajakan, yang meliputi Pelayanan Pajak :

- a. Pajak Hotel,
- b. Pajak Restoran,
- c. Pajak Hiburan,
- d. Pajak Reklame,
- e. Pajak Penerangan Jalan,
- f. Pajak Bahan Galian Golongan C,
- g. Pajak Parkir,
- h. Pajak Air Bawah Tanah,
- i. Pajak Sarang Burung Walet,
- j. Pajak BPHTB
- k. Pajak PBB-P2

Adapun Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur, sesuai dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2016 (pasal 5) terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretaris, membawahkan :
  - b.1. Sub Bagian Perencanaan;
  - b.2. Sub Bagian Keuangan;
  - b.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membawahkan :
  - c.1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
  - c.2. Sub Bidang Perhitungan, Penilaian dan Penetapan;
  - c.3. Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.
- d. Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan :
  - d.1. Sub Bidang Pendaftaran dan Verifikasi;
  - d.2. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
  - d.3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
- e. Bidang Penagihan Pajak Daerah, membawahi :
  - e.1. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
  - e.2. Sub Bidang Pengaduan dan Penatausahaan Piutang;
  - e.3. Sub Bidang Penertiban dan Penagihan.
- f. UPTB;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **1.2 Landasan Hukum**

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 244);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jabar Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 10 seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur 2011-2031;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 08).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 09).
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### Maksud :

Maksud Penyusunan Renja Perubahan pada *Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur* adalah sebagai upaya percepatan tercapainya visi dan misi dilaksanakan secara konsisten sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

#### Tujuan :

1. Sinkronisasi antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019 dengan substansi dokumen Perubahan Renja Tahun 2019.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh elemen *Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur* dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang telah dicanangkan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Perubahan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum keberadaan organisasi dan perencanaan anggaran, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renja Perubahan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

#### **BAB 2 : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja PD 2019 sampai dengan Triwulan I yang meliputi realisasi capaian tahun berjalan, memuat juga analisis kinerja yang menjabarkan kajian (review) terhadap capaian kinerja pada pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi beserta solusi yang dilakukan

#### **BAB 3 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat tujuan dan sasaran terhadap tugas dan fungsi PD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD, review terhadap rancangan perubahan RKPD tahun 2019 serta rencana program dan kegiatan perubahan Renja PD tahun 2019.



#### **BAB 4 : PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN**  
**TRIWULAN II**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Sampai Dengan Triwulan II**

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II untuk Rancangan Akhir Renja PD.

Diperoleh capaian sampai dengan triwulan II dimana indikator sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah, dengan target Rp. 191.363.499.633,00 sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2019 realisasi pendapatan yaitu sebesar Rp. 80.186.237.662,00 atau 41.90 % dari target yang ditentukan, sedangkan untuk serapan anggaran dari target sebesar Rp 5,470,000,000.00 terealisasi sebesar Rp. 1,566,021,600 atau 28,63%.

Adapun Rencana perubahan anggaran pada Program Peningkatan Pendapatan Daerah dari sepuluh (10) kegiatan yang dilaksanakan yaitu dari semula Rp. 5.466.746.600,00 menjadi Rp. 8,533,721,150.00 ada penambahan sebesar Rp. 3,066,974,550.00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun anggaran 2019

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi s/d triwulan II	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>191.363.499.633,00</b>	<b>80.186.237.662,00</b>	<b>41.90</b>
	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>191.363.499.633,00</b>	<b>80.186.237.662,00</b>	<b>41.90</b>
a.	<b>11 JENIS PAJAK</b>				
	1. Pajak Hotel	Rp	15.660.240.000,00	7.962.477.797,00	50.85
	2. Pajak Restoran	Rp	12.833.650.000,00	7.976.199.841,00	62.15
	3. Pajak Hiburan	Rp	1.942.080.000,00	794.831.222,00	40.93
	4. Pajak Reklame	Rp	5.777.525.000,00	2.498.153.759,00	43.24
	5. Pajak Penerangan Jalan	Rp	44.979.788.762,00	20.755.955.761,00	46.15
	6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	Rp	3.259.860.000,00	971.607.600,00	29.81
	7. Pajak Parkir	Rp	1.092.720.000,00	327.997.450,00	30.02
	8. Pajak Air Tanah	Rp	7.540.200.000,00	4.370.245.376,00	57.96
	9. Pajak Sarang Burung Walet	Rp	18.480.000,00	6.650.000,00	35.98
	10. Pajak BPHTB	Rp	47.500.000.000,00	16.762.826.879,00	35.29
	11. Pajak PBB-P2	Rp	50.758.955.871,00	17.759.291.977,00	34.99

Tabel I																																
Formulir Evaluasi Hasil Renja OPD																																
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR																																
Periode Pelaksanaan : 2019 Triwulan II																																
Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah :																																
No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%			14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100 %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
	4	0	1																			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah										
	4	0	1	0	5																											
	4	0	1	0	5																											
1	4	0	1	0	5	6	6	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Daerah	860,241,923,511	55,396,000,000	363,508,369,004	10,140,265,570	191,363,499,633	5,470,000,000	37,152,363,090	255,896,000	43,033,874,572	1,310,125,600	-	-	-	-	80,186,237,662	1,566,021,600	41.903	28.63	11,706,287,170	51.583	21.13		
1.1	0							Pendataan dan Penilaian PBB-P2	- Jumlah Dokumen Pendataan Objek dan Subjek PBB serta Penilaian Objek PBB	10	8,520,000,000	4	1,529,343,260	2	739,599,100	0	36,350,000	0	152,797,000	-	0	-	0	-	189,147,000	0.007	25.57	4	1,718,490,260	40.007	20.17	
1.2	0							Pendaftaran dan Verifikasi PBB-P2 dan BPHTB	- Jumlah Pendaftar baru PBB-P2	2,761	4,775,000,000	1,463	876,754,400	551	747,286,000	160	35,390,000	173	241,481,000	-	0	-	0	333	276,861,000	60.445	37.05	1,153,615,400	65.056	24.16		

					- Jumlah transaksi BPHTB	68,000		25,622		13,600							0	-	0	-	0	4,835	-	<b>35.55</b>				44.79			
<b>1.3</b>	<b>0</b>				Pengolahan Data dan Pencetakan SPPT dan DHKP PBB-P2	- Jumlah SPPT PBB yang dicetak	5,679,909	7,350,000,000	2,126,153	1,262,303,700	1,127,762	681,120,000		2509	7,320,000	0	2326		0		0		1,115,329	191,056,000	<b>98.90</b>	28.05	30,457	1,453,359,700	57.07	19.77	
						- Jumlah DHKP PBB yang dicetak	10,280		4,160		2,056			1115329		0	0		0		0			-	<b>103.70</b>		6,292		61.21		
<b>1.5</b>	<b>0</b>				Penatausahaan Piutang Pajak Daerah	Jumlah dokumen Data piutang pajak daerah yang akuntabel	5	2,250,000,000	2	590,924,000	1	435,515,000		0	32,022,000	0	0		-	0	-	0		140,004,000	<b>0.00</b>	32.15	2	730,928,000	40.00	32.49	
<b>1.7</b>	<b>0</b>				Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak baru yang terdata	1,425	4,995,000,000	588	1,073,233,000	285	429,802,600		53	34,080,000.0	64	0	1,484,415,000		-	0	-	0	117	182,495,000	<b>41.05</b>	42.46	705	1,255,728,000	49.47	25.14
<b>1.8</b>	<b>0</b>				Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah	Bahan pedoman untuk perencanaan retribusi daerah (dok)	1	475,000,000	1	299,298,000	0	-		0	0	-	0	0		-	0	-	0	-	-		1	-	100.00	0.00	
<b>1.8</b>	<b>0</b>				Penyelenggaraan Retribusi Daerah	- Jumlah laporan penerimaan pendapatan Retribusi Daerah	3	1,750,000,000	0	-	1	421,435,000		0	0	0	0	0		-	0	-	0	48,745,000	<b>0.00</b>	0.12		48,745,000	0.00	2.79	
						- Jumlah karcis Retribusi Daerah yang dicetak	145,800		0	-	48,600		0		41770									-	<b>85.95</b>						



Dilihat dari tabel 1, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun anggaran 2019. Hal ini didasarkan pada kondisi dan fakta yang ada antara lain :

1. Peningkatan kegiatan pengelolaan PBB

Pengelolaan PBB merupakan pelayanan kepada masyarakat yang mengurus pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan, pelayanan yang diberikan terdiri dari pendataan Objek atau wajib pajak baru, mutasi pajak PBB-P2, pembetulan, pembatalan, keberatan dan pengurangan data spt PBB-P2. Permasalahan yang dihadapi pada pelayanan ini diantaranya tidak lengkapnya berkas persyaratan yang diajukan oleh wajib pajak serta adanya usulan data yang diragukan kebenarannya.

2. Peningkatan kegiatan pengelolaan BPHTB

Pelayanan pajak BPHTB terdiri dari dua jenis transaksi yaitu transaksi bayar dan nihil. Permasalahan mendasar BPHTB yaitu masih terdapat PPAT/PPATS dalam verifikasi BPHTB menggunakan harga NJOP serta adanya beberapa wajib pajak yang telah melaksanakan pembayaran BPHTB ke Bank bjb tidak melakukan validasi ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

3. Peningkatan Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah

Pengelolaan pajak daerah merupakan kegiatan pelayanan 9 jenis pajak daerah (pajak non PBB-P2 dan BPHTB) permasalahan yang timbul secara ekstensifikasi yaitu masih banyaknya wajib pajak yang belum memiliki ijin usaha, sehingga pajak daerahnya tidak bisa dipungut. Secara intensifikasi permasalahan yang timbul yaitu letak geografis Kabupaten Cianjur yang luas mengakibatkan wajib pajak terutama daerah Cianjur Selatan kurang patuh dalam melaporkan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) berikut lampiran bukti transaksinya. Permasalahan lain yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan daerah yang tepat waktu dan tepat jumlah, sehingga sangat berdampak pada realisasi capaian target pajak daerah yang telah ditetapkan .

4. Penagihan Pajak Daerah

Penertiban penunggak pajak daerah, pengawasan dan penagihan pajak daerah serta pemeriksaan pajak daerah merupakan kegiatan bagian dari penagihan pajak daerah. Permasalahannya yaitu sumber daya manusia yang dimiliki kurang ideal, belum adanya perangkat juru sita, juru taksir dan PPNS serta belum adanya Auditor Pajak.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Target pencapaian kinerja lembaga terfokus pada 11 jenis pajak daerah, terselenggaranya pelayanan Pajak Daerah merupakan tugas pokok lembaga dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi Pajak Daerah yang ada di Kabupaten Cianjur, sehingga kendala yang dihadapi mencakup pada pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang berhubungan dengan pencapaian realisasi target pajak daerah.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur adalah merupakan pedoman perencanaan PD berdasarkan hasil evaluasi Renja 2019 sampai dengan Triwulan II, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat serta arahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di sub sektor pendapatan daerah khususnya sektor pajak daerah.

Untuk mencapai **tujuan dan sasaran pembangunan** diperlukan strategi pembangunan yang dijabarkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan, maka sebagai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dibidang Perpajakan Daerah harus ditunjang oleh beberapa aspek guna kelancaran pengelolaan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Membangun Reformasi Birokrasi;
2. Sarana dan prasarana yang memadai;
3. Regulasi yang meliputi Perda dan peraturan pelaksanaan lainnya;
4. Ketersediaan kualitas sumber daya manusia.

Disamping kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur antara lain :

1. Penggunaan sarana teknologi informasi berupa alat perekam data transaksi berbasis aplikasi untuk meningkatkan akurasi data transaksi sesuai dilapangan;
2. Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perpajakan;
3. Memberikan kesempatan kepada setiap aparatur untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian;
4. Revitalisasi asset daerah;
5. Pembangunan dan pengembangan pelayanan.

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah, salah satu inovasi yang dilakukan adalah pemasangan alat perekam transaksi pada perangkat yang digunakan oleh wajib pajak, alat tersebut terintegrasi dengan secara online dan otomatis terekam oleh perangkat yang ada di kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur, sehingga tingkat akurasi akan tinggi. Selain itu inovasi dimaksud akan meminimalisir manipulasi data oleh pihak2 yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu adanya pengalihan Pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat berdampak positif diantaranya sebagai berikut :

1. Akurasi data objek dan subjek PBB P2, dapat lebih ditingkatkan karena aparat pemerintah daerah lebih menguasai wilayahnya apabila dibandingkan dengan aparat pemerintah pusat sehingga dapat meminimalisir pengajuan keberatan dari para wajib pajak PBB P2;
2. Pemberdayaan *local taxing power*, yaitu kewenangan penuh daerah dalam penentuan tarif dan pengelolaan administrasi pemungutan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas;

Begitu pula pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pusat menjadi pajak daerah merupakan suatu langkah strategis dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan pengalihan pajak ini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas belanja Daerah.

Dengan peningkatan kualitas belanja daerah tersebut akan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang merupakan tujuan dari kebijakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat disamping untuk mengoptimalkan kinerja pendapatan daerah diantaranya sebagai berikut :

1. Aspek Kebijakan : Mengenai besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOP-TKP), adapun solusinya dengan Perumusan dan Penetapan Perda BPHTB yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati sesuai dengan perkembangan kebutuhan, antisipasi dan kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan pelayanan BPHTB;
2. Aspek Teknis : Mengenai keterbatasan Sarana dan Prasarana, yakni dengan menyediakan komputer pendukung dan penyempurnaan system aplikasi;
3. Aspek Legal : Mengenai mekanisme pembayaran BPHTB, yakni dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam melayani



masyarakat serta membina hubungan kerjasama yang baik dengan pihak terkait (koordinasi lintas sektor).

Pencapaian Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kabupaten Cianjur tahun 2019 serta proyeksi pencapaian tahun – tahun berikutnya dijabarkan pada table 2 sebagai berikut berdasarkan indikator kinerja:

**Tabel 2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR**  
**Kabupaten Cianjur**

NO	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra PD (2019)			Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi (2019)		Satuan	Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah	Peningkatkan kapasitas keuangan Daerah melalui kemandirian fiscal Pemerintah Kab. Cianjur	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dan Nomor 6 Tahun 2008	171.263.374.361	194.398.198.762	195.346.008.762	170.746.334.320	194.574.699.280	191.363.499.633	194.398.198.762		
	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Daerah	Peningkatkan kapasitas keuangan Daerah melalui kemandirian fiscal Pemerintah Kab. Cianjur	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dan Nomor 6 Tahun 2008	100%	100%	100%	78,49%	72,10%	75,30%	75,30%		

### **2.3 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD 2019**

Adapun pemecahan masalah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur, antara lain :

1. Melakukan koordinasi dengan aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan khususnya pengelola PBB untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait persyaratan pengajuan pelayanan PBB. Untuk kekurangan persyaratan seperti belum e-ktp dapat diganti dengan KK (Kartu Keluarga), dan data yang diragukan kebenarannya petugas melakukan pengecekan/survey ke lokasi objek pajak.
2. Melengkapi setiap transaksi BPHTB dengan kwitansi jual beli dan di sertakan dengan surat pernyataan dari penjual dan pembeli bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan sebenarnya, PPAT/PPATS diberikan pedoman sesuai harga pasaran didaerah setempat. Melakukan penelitian lapangan setiap objek pajak BPHTB yang menggunakan transaksi nilai NJOP dan yang mencantumkan nilai transaksi yang meragukan. Serta rencana kedepan akan melakukan rekonsiliasi dengan Badan Pertanahan Nasional wilayah Kabupaten Cianjur.
3. Melakukan Ektensifikasi dan Intensifikasi.  
Ektensifikasi yaitu dengan secara terus menerus melakukan penggalian potensi Pajak Daerah baru yang belum terdaftar menjadi Wajib Pajak, sedangkan Intensifikasi adalah melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak dengan tujuan menciptakan kondisi wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan tepat jumlah. Melakukan beberapa upaya optimalisasi petugas pemungut pajak daerah melalui penugasan ke daerah yang letak geografisnya jauh, melakukan koordinasi dengan Dinas terkait tentang ijin usaha. Solusi dari rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban, yaitu dengan dilaksanakannya proses pemungutan pajak daerah oleh fiskus melalui tahapan pendataan, pendaftaran, perhitungan pajak, pelaporan pajak, pembayaran dan penagihan pajak serta konsultasi dan penyuluhan kepada wajib pajak ditunjang pula pemeliharaan dan pengadaan software hardware pengelolaan pajak daerah dapat meningkatkan pengelolaan pajak daerah yang optimal.
4. Sehubungan dengan belum optimalnya sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah khususnya pada Bidang Penagihan karena

belum memiliki perangkat juru sita dan juru taksir, maka solusinya yaitu dengan pembuatan berita acara perjanjian pembayaran tunggakan untuk wajib pajak yang menunggak. Belanja perjalanan dinas daerah untuk kegiatan pemeriksaan pajak daerah disesuaikan dengan hasil realisasi pada tahun sebelumnya.

5. Lebih ditingkatkan kembali penertiban khusus reklame-reklame yang telah habis masa pasanganya dan mencari wajib pajak baru yang dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak reklame.

**BAB III.**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Tujuan dan Sasaran**

Sasaran dan atau target kinerja dapat dicerminkan kedalam target pendapatan yaitu pajak daerah yang menjadi urusan dan kewenangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur. Target Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2019 yaitu 191,363,499,633.00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan diperlukan adanya strategi maupun kebijakan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Strategi dan kebijakan yang disusun oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Kabupaten Cianjur harus mengacu kepada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016-2021.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang keuangan, terkait pada Misi ketiga yaitu : **Peningkatan Akselerasi Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Pembangunan Bidang Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan.** Sesuai dengan misi tersebut, Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur dalam lima Tahun mendatang yakni 2016-2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD.

**3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019**

Review berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.

Visi Pemerintah Kabupaten Cianjur periode 2016-2021, yaitu “Cianjur Lebih Maju dan Agamis”:

Sedangkan Misi :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan;

2. Meningkatkan pembangunan keagamaan;
3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselesari bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Untuk perencanaan pembangunan jangka menengah yang memberikan arah 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Cianjur terpilih tahun 2016-2021, yaitu:

1. Menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. Memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan RKPD setiap tahun sebagai penjabaran RPJMD, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD; dan
4. Menyediakan instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus capaian kinerja perangkat daerah.

Untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur periode 2016-2021, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur:

” Tewujudnya aparatur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang profesional, lebih cerdas, maju dan agamis dalam upaya meningkatkan pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Cianjur ”.

Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur:

- Misi kesatu : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang profesional;
- Misi kedua : Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah;
- Misi ketiga : Meningkatkan Potensi Pendapatan Daerah;
- Misi keempat : Meningkatkan Efektivitas Koordinasi Internal dan Eksternal.

Table Review Terhadap rancangan Perubahan RKPD tahun 2019 Kabupaten Cianjur sebagaimana pada table 3 sebagai berikut:

Tabel 3  
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2019  
Kabupaten Cianjur

Nama PD : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

No	Rancangan Perubahan RKPD 2019					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Kab. Cianjur	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	193.363.499.633	8,533,721,150.00	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Kab. Cianjur	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	193.363.499.633	8,533,721,150.00	
1	Pendaftaran dan Verifikasi PBB-P2 dan BPHTB	Kab. Cianjur	- Jumlah Pendaftar baru PBB-P2	525 Wajib Pajak	1,026,436,000.00	Kegiatan Pendaftaran dan Verifikasi PBB-P2 dan BPHTB	Kab. Cianjur	- Jumlah Pendaftar baru PBB-P2	525 Wajib Pajak	1,026,436,000.00	
			- Jumlah transaksi BPHTB	13400 Transaksi					- Jumlah transaksi BPHTB	13400 Transaksi	

2	Pendataan dan Penilaian PBB	Kab. Cianjur	Jumlah Dokumen Pendataan Objek dan Subjek PBB serta Penilaian Objek PBB (dok)	2 dokumen	890,614,100.00	Kegiatan Pendataan dan Penilaian PBB	Kab. Cianjur	Jumlah Dokumen Pendataan Objek dan Subjek PBB serta Penilaian Objek PBB (dok)	2 dokumen	890,614,100.00	
3	Pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah	Kab. Cianjur	Jumlah wajib pajak baru yang terdata	250 Wajib pajak	984,296,930.00	Pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah	Kab. Cianjur	Jumlah wajib pajak baru yang terdata	250 Wajib pajak	984,296,930.00	
4	Penatausahaan Piutang Pajak Daerah	Kab. Cianjur	Data piutang pajak daerah yang akuntabel (dok)	1 dokumen	474,580,000.00	Penatausahaan Piutang Pajak Daerah	Kab. Cianjur	Data piutang pajak daerah yang akuntabel (dok)	1 dokumen	474,580,000.00	
5	Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Cianjur	Jumlah Wajib Pajak yang ditertibkan dan ditagih	2363 Wajib Pajak	1,066,432,000.00	Kegiatan Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Cianjur	Jumlah Wajib Pajak yang ditertibkan dan ditagih	2363 Wajib Pajak	1,066,432,000.00	
6	Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Kab. Cianjur	Jumlah wajib pajak yang diawasi dan diperiksa	4696 Wajib Pajak	681.652.400.00	Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Kab. Cianjur	Jumlah wajib pajak yang diawasi dan diperiksa	4696 Wajib Pajak	681.652.400.00	



7	Perhitungan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah	Kab. Cianjur	a.Jumlah SKPD yang disampaikan pada wajib pajak	7073 Lembar	1,062,906,000.00	Perhitungan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah	Kab. Cianjur	a.Jumlah SKPD yang disampaikan pada wajib pajak	7073 Lembar	1,062,906,000.00
			b.Jumlah SPTPD dan surat teguran pengembalian SPTPD yang disampaikan pada wajib pajak	965 lembar				c.Jumlah SPTPD dan surat teguran pengembalian SPTPD yang disampaikan pada wajib pajak	965 lembar	
8	Pengolahan Data dan Pencetakan SPPT dan DHKP PBB-P2	Kab. Cianjur	Jumlah SPPT PBB yang dicetak	1.073.602 SPPT	881,120,000.00			Jumlah SPPT PBB yang dicetak	1.073.602 SPPT	881,120,000.00
			Jumlah DHKP PBB yang dicetak	2104 DHKP				Jumlah DHKP PBB yang dicetak	2104 DHKP	

	9	Pelayanan Pajak Jago Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kab. Cianjur	Jumlah pelayanan jenis pajak daerah berbasis teknologi, informasi dan komunikasi yang dikelola	3 dokumen	839,840,000.00		Pelayanan Pajak Jago Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kab. Cianjur	Jumlah pelayanan jenis pajak daerah berbasis teknologi, informasi dan komunikasi yang dikelola		839,840,000.00	
	10	Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Dok)	Kab. Cianjur	-Jumlah laporan penerimaan pendapatan Retribusi Daerah (dok)	1 dokumen	625,843,720.00		Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Dok)	Kab. Cianjur	-Jumlah laporan penerimaan pendapatan Retribusi Daerah (dok)	1 dokumen	625,843,720.00	
				-Jumlah karcis Retribusi Daerah yang dicetak (blok)	48.600					-Jumlah karcis Retribusi Daerah yang dicetak (blok)	48.600		
				-Jumlah Dokumen evaluasi dan pengawasan terhadap penarikan setoran karcis Retribusi (dok)	1 dokumen					-Jumlah Dokumen evaluasi dan pengawasan terhadap penarikan setoran karcis Retribusi (dok)	1 dokumen		

### **3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2019**

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur Pada Tahun 2019 akan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya mencapai prediksi target sebagai berikut :

3.3.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas aparatur maka direncanakan kegiatan Pengembangan Standar Operational Procedure (SOP) Pelayanan Pajak Daerah;

3.3.2 Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah

Untuk melaksanakan misi kedua, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam tahun 2019 akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pencetakan Massal SPPT dan DHKP PBB-P2;
- Perhitungan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah;
- Penatausahaan Piutang Pajak Daerah;
- Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
- Pendataan dan Penilaian PBB.

3.3.3 Meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya meningkatkan pendapatan khususnya dari sektor Pendapatan Pajak Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam tahun 2019 akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah;
- Pendaftaran dan Verifikasi Pengelolaan PBB-P2 - BPHTB;
- Penyelenggaraan Retribusi Daerah;
- Pelayanan Pajak Jago Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Terbaik.

Tabel 4  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Pada Perubahan Renja Tahun 2019  
dan Prakiraan Maju Tahun 2020  
Kabupaten Cianjur

**Nama PD : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana			Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	K	Rp
4	01									
		<b>Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan</b>								
4	01	05								
		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah								
4	01	05	66							
		<b>Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Daerah</b>	Cianjur		8,533,721,150.00	PAD			8.588.167.600
		<b>Pembangunan Panggung Reklame</b>	Terwujudnya pembangunan panggung reklame	Cianjur					7 titik	300.000.000
		<b>Sosialisasi Pajak Daerah</b>	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pajak daerah	Cianjur					100 Orang	200.000.000
		<b>Pendataan dan Penilaian PBB-P2</b>	Jumlah Dokumen Pendataan Objek dan Subjek PBB serta Penilaian Objek PBB	Cianjur	2 dokumen	890,614,100.00	PAD		2 dokumen	1.453.588.000

				<b>Pendaftaran dan Verifikasi PBB-P2 dan BPHTB</b>	- Jumlah Pendaftar baru PBB-P2	<b>Cianjur</b>	525 Wajib Pajak	1,026,436,000.00	PAD			578 Wajib Pajak	877.762.000
					- Jumlah transaksi BPHTB	<b>Cianjur</b>	13.400 Transaksi		PAD			13800 Transaksi	
				<b>Pengolahan Data dan Pencetakan SPPT dan DHKP PBB-P2</b>	Jumlah SPPT PBB yang dicetak	<b>Cianjur</b>	1.073.602 SPPT	881,120,000.00	PAD			1183646 SPPT	769.720.000
					Jumlah DHKP PBB yang dicetak		2.056 DHKP		PAD			2056 DHKP	
				<b>Penatausahaan Piutang Pajak Daerah</b>	Jumlah dokumen Data piutang pajak daerah yang akuntabel)	<b>Cianjur</b>	1 dokumen	474,580,000.00	PAD			1 dokumen	454.800.000
				<b>Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah</b>	Jumlah wajib pajak baru yang terdata	<b>Cianjur</b>	250 wajib pajak	984,296,930.00	PAD			250 Wajib Pajak	967.977.600
				<b>Penyelenggaraan Retribusi Daerah</b>	-Jumlah laporan penerimaan pendapatan Retribusi Daerah (dok)		1	497,000,000.00	PAD			1	530,345,000
					-Jumlah karcis Retribusi Daerah yang dicetak (blok)		48.600					48.600	
					-Jumlah Dokumen evaluasi dan pengawasan terhadap penarikan setoran karcis Retribusi (dok)		1					1	

				<b>Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah</b>	Jumlah Wajib Pajak yang ditertibkan dan ditagih	<b>Cianjur</b>	2363 Wajib Pajak	1,066,432,000.00	PAD			2363	854.800.000
				<b>Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah</b>	- Jumlah wajib pajak yang diawasi dan diperiksa	<b>Cianjur</b>	4696 Wajib Pajak	681.652.400.00	PAD			4941 Wajib Pajak	1.103.600.000
				<b>Perhitungan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah</b>	- Jumlah SKPD yang disampaikan pada wajib pajak	<b>Cianjur</b>	7073 Lembar	1,062,906,000.00	PAD			7148 Lembar	675.575.000
					Jumlah SPTPD dan surat teguran pengembalian SPTPD yang disampaikan pada wajib pajak	<b>Cianjur</b>	965 lembar		PAD			1035 Lembar	
				<b>Pelayanan Pajak Jago Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	Jumlah pelayanan jenis pajak daerah berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	<b>Cianjur</b>	3 dokumen	839,840,000.00	PAD			4 Jenis Pajak	400.000.000

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Illahi Robi bahwasanya kami telah dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019. Hal ini merupakan Rencana Kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur 2016-2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Cianjur serta target dan sasaran pembangunan yang dioptimalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2019. Rencana Kerja ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan Program / Kegiatan sebagai fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun yang akan datang dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Dengan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur maupun dengan lembaga yang membidangi fungsi lain.

Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mohon masukan yang konstruktif agar dimasa yang akan datang, kami dapat menyusun laporan Renja ini jauh lebih baik. Harapan kami semoga Rencana Kerja ini dapat dijadikan pedoman serta arah pelaksanaan program dan kegiatan serta renungan dan kajian kita semua. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan berkah dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

Cianjur,      Juli 2019

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah,  
Kabupaten Cianjur,

Drs. CAHYO SUPRIYO  
NIP. 19620629 198903 1 003

**Tabel 5**  
**Prioritas dan Sasaran Daerah**

Prioritas Daerah (Sapta Cita)		Sasaran Dearah	
Ket.Simbol	Prioritas Daerah	Ket. Simbol	Sasaran Dearah
1	Peningkatan Infrastruktur, Tata ruang dan Lingkungan Hidup	1.a	Meningkatnya infrastuktur Daerah
		1.b	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup
2	Peningkatan Sosial dan Keagamaan	2.a	Meningkatnya sikap dan prilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia
		2.b	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
3	Peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan	3.a	Meningkatnya akseibilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata
4	Peningkatan Kesehatan	4.a	Meningkatnya akseibilitas dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata
5	Peningkatan Ekonomi	5.a	Menguatnya ekonomi Daerah
		5.b	Berkurangnya kemiskinan
6	Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata	6.a	Meningkatnya ekonomi sektor agribisnis dan pariwisata
		6.b	Mantapnya ketahanan pangan masyarakat
7	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	7.a	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntable
		7.b	Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik





